RAUDHAH Proud To Be Professionals *JurnalTarbiyahIslamiyah*
Volume 10 Nomor 3 Edisi Desember 2025
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA: PERSPEKTIF PENJAMINAN MUTU BERKELANJUTAN

[1]Azizatur Rosyidah, [2]Romi Faslah
[1]Fakultas Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Email: 240101210037@student.uin-malang.ac.id
[2] Fakultas Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Email: romi@uin-malang.ac.id

Abstract : *This study analyzes the implementation of quality control in Indonesian higher education through the framework of the Internal Quality Assurance System (SPMI) and the External Quality Assurance System (SPME), with particular attention to their strategic integration in fostering a sustainable quality culture. Employing a qualitative library research approach, this study is based on a critical review of academic literature, government regulations, policy documents, and previous research related to higher education quality assurance. The findings indicate that although SPMI and SPME function as fundamental instruments for maintaining and improving educational quality, their implementation in many higher education institutions remains largely administrative and compliance-oriented, with limited internalization of quality culture. This study conceptually contributes by integrating modern quality control theories—such as the PDCA cycle, Crosby's prevention-based quality approach, and Sallis's collaborative quality management—into the analysis of SPMI and SPME as a unified and continuous quality control system. The study emphasizes that the strategic integration of internal and external quality assurance is essential for transforming quality assurance from procedural fulfillment into a sustainable institutional culture. These findings imply that strengthening leadership commitment, human resource competencies, data-based evaluation systems, and stakeholder collaboration is critical for improving governance effectiveness and achieving sustainable quality improvement in Indonesian higher education.*

Keywords : *Higher Education, Quality Assurance System, Internal Quality Assurance, External Quality Assurance, Quality Improvement.*

Pendahuluan

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, mutu pendidikan tinggi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing bangsa, karena kualitas lulusan yang sangat berpengaruh dalam kemajuan sosial, ekonomi, dan peradaban suatu negara (Fadli, 2020). Oleh sebab itu, perguruan tinggi dituntut untuk menjamin bahwa seluruh proses akademik dan tata kelola kelembagaan dilaksanakan secara bermutu, akuntabel, dan

berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu yang terstruktur. Pemerintah Indonesis telah merespons kebutuhan tersebut dengan mewajibkan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (Kementerian Hukum dan HAM, 2012).

Meskipun kerangka regulatif penjaminan mutu telah terseda secara jelas, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi SPMI dan SPME di perguruan tinggi masih menghadapi persoalan mendasar. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya dukungan institusional, tetapi juga rendahnya internalisasi budaya mutu di kalangan sivitas akademika (Najwa, Iqbal, & Aryani, 2023). Lebih jauh, praktik penjaminan mutu di banyak perguruan tinggi cenderung bersifat administratif dan berorientasi pada pemenuhan tuntutan akreditasi semata, sehingga belum sepenuhnya mendorong terwujudnya pengendalian mutu yang ebrkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep penjaminan mutu yang ideal dan praktik implementatif di lapangan, teruatama dalam membangun budaya mutu sebagai bagian integral dari tata kelola pendidikan tinggi.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas penjaminan mutu pendidikan tinggi dari aspek kebijakan, mekanisme akreditasi, atau evaluasi kelembagaan secara parsial. Namun, kajian yang secara komprehensif mengaitkan implementasi SPMI, SPME dengan teori pengendalian mutu berkelanjutan seperti siklus PDCA dari Ishikawa, konsep kesesuaian terhadap standar dari Crosby, serta pendekatan mutru pendidikan kolaboratif dari Sallis yang masih terbatas. Padahal, ketiga perspektif tersebut memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami penjaminan mutu tidak hanya sebagai instrumen evaluasi, tetapi sebagai proses perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui kerangka SPMI dan SPME dengan pendekatan konseptual berbasis teori mutu modern. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada: 1) pemetaan konsep pengendalian mutu pendidikan tinggi, 2) analisis implementasi SPMI dan SPME dalam perspektif pengendalian mutu berkelanjutan, serta 3) identifikas tantangan utama dan strategi perbaikan yang relevan untuk penguatan budaya mutu di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode studi keputakaan dengan telaah artikel ilmiah, regulasi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kosnep serta praktik pengendalian mutu pendidikan tinggi di indonesia.

Kajian Pustaka

Pengendalian mutu dalam pendidikan tinggi merupakan proses sistematis yang bertujuan memastikan seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar dan mampu mencapai tujuan lembaga secara efektif. Teori pengendalian mutu yang banyak dijadikan rujukan adalah teori *Quality Control* yang dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa. Ishikawa menekankan bahwa mutu harus dikendalikan melalui siklus berkelanjutan yang dikenal sebagai *Plan–Do–Check–Action (PDCA)*. Siklus ini menempatkan perbaikan mutu sebagai proses yang tidak pernah berhenti dimulai dari perencanaan berbasis kebutuhan, pelaksanaan strategi, evaluasi sistematis, hingga tindakan korektif untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan (Ishikawa, 1985). Dalam konteks perguruan tinggi, konsep ini berfungsi untuk memastikan bahwa kurikulum, proses pembelajaran, pelatihan dosen, evaluasi akademik, dan layanan mahasiswa berjalan dalam pola yang dapat dievaluasi dan ditingkatkan terus-menerus.

Selain itu, teori mutu Philip B. Crosby juga memberikan kontribusi penting dalam memahami manajemen mutu lembaga pendidikan tinggi. Crosby (1979) menegaskan bahwa mutu adalah "kesesuaian terhadap persyaratan," bukan sekadar kesempurnaan hasil. Prinsip pencegahan (*prevention*) dan standar *zero defect* yang diperkenalkannya menekankan bahwa kesalahan harus diminimalkan sejak awal melalui pelatihan, komitmen pimpinan, dan disiplin organisasi. Dalam dunia pendidikan tinggi, hal ini berarti bahwa mutu tidak hanya tergantung pada capaian lulusan, tetapi juga pada sistem tata kelola, kedisiplinan akademik, serta budaya kerja yang menjunjung peningkatan kinerja secara konsisten.

Sementara itu, Edward Sallis memandang mutu pendidikan sebagai proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dunia industri, dan masyarakat luas. Sallis (2012) menyatakan bahwa mutu perguruan tinggi tidak hanya diukur melalui standar administrasi atau akreditasi semata, tetapi juga melalui persepsi, kepuasan, dan relevansi lulusan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini relevan untuk perguruan tinggi di Indonesia yang sedang berupaya mengembangkan kualitas melalui integrasi penjaminan mutu internal dan eksternal sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik.

Temuan berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan penjaminan mutu sangat bergantung pada budaya mutu yang hidup dalam organisasi. Najwa, Iqbal, dan Aryani (2023) menemukan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akan efektif apabila didukung oleh komitmen pimpinan, pelatihan sumber daya manusia, serta sistem evaluasi berbasis data. Penelitian lain oleh Yulisma et al. (2023) serta Siswanto dan Silitonga (2023) menunjukkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) seperti akreditasi

tidak dapat berdampak optimal tanpa kesiapan internal perguruan tinggi dalam mengelola perbaikan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kerangka teoritis penelitian ini memposisikan SPMI sebagai mekanisme internal yang mendorong perbaikan melalui penerapan siklus PDCA, didukung oleh prinsip budaya mutu dan pencegahan kesalahan menurut Crosby, serta diarahkan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder sebagaimana dijelaskan Sallis. Implementasi SPMI yang baik diharapkan membentuk budaya mutu yang kuat, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan mutu lulusan dan kinerja institusi. SPME berperan sebagai penguatan eksternal yang memberikan validasi dan akuntabilitas sehingga mutu tidak hanya terpelihara secara internal, tetapi juga diakui secara nasional. Dengan demikian, hubungan antara pengendalian mutu internal, budaya mutu, dan penjaminan mutu eksternal membentuk suatu sistem terpadu yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustakan(*library research*) dengan menelaah dan menganalisis berbagai tertulis yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sumber pustaka dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan pengendalian mutu pendidikan tinggi, kredibilitas penerbit atau lembaga, kelengkapan data, dan rentan publikasi antara tahun 2000-2025 untuk mencakup perkembangan konsep dan praktik yang muthakir. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, seleksi, dan pemilahan sumber secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Tahapan analisis meliputi pengelompokan informasi ke dalam tema utama, perbandingan konsep antar sumber untuk menilai kesamaan, perbedaan, dan relevansi teori dan praktik, serta sintesis temuan untuk membangun pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai implementasi pengendalian mutu pendidikan tinggi dan relevansinya terhadap peningkatan kualitas lembaga secara berkelanjutan. Dengan penajaman ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan implementasi SPMI dan SPME, tetapi juga menegaskan hubungan antara konsep, praktik, tantangan, dan strategi perbaikan dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia.

Pembahasan

Konsep Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi

Pengendalian mutu (*quality control*) dalam pendidikan tinggi merupakan bagian integral dari manajemen mutu yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik dan non akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya menekankan

pada evaluasi hasil akhir, pengendalian mutu menuntut keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Temuan kajian ini sejalan dengan pandangan Mitra dan Ishikawa yang menekankan bahwa mutu tidak bersifat isidental, melainkan dihasilkan melalui sistem yang terencana dan dikendalikan secara konsisten. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memaknai *quality control* sebatas instrumen evaluasi (misalnya penilaian kinerja atau akreditasi), kajian ini menegaskan bahwa pengendalian mutu dalam pendidikan tinggi harus dipahami sebagai proses yang mncakup input, proses, dan output. Hal ini memperkuat temuan Ishikawa (1985) yang menempatkan kepuasan pengguna layanan sebagai orientasi utama pengendalian mutu, sekaligus memperluas konteksnya ke dalam tata kelola perguruan tinggi yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks pendidikan tinggi, mutu proses pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari efektivitas perencanaan akademik dan konsistensi evaluasi internal. Berbeda dengan beberapa kajian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek administrasif mutu, hasil analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian mutu sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh unsur institusi dalam membangun budaya mutu. Dengan demikian, pengendalian mutu bukan hanya tanggung jawab unit penjaminan mutu, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh sivitas akademika. Secara yuridis, temuan kajian ini menguatkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa evaluasi pendidikan merupakan bagian dari pengendalian dan penjaminan mutu. Namun, kajian ini menambahkan perspektif kritis bahwakerangka regulatif tersebut akan efektif apabila diiringi dengan internalisasi nilai mutu dalam praktik institusional perguruan tinggi.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Eksternal (SPME)

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan wujud konkret dari pengendalian mutu yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Sejalan dengan temuan Direktorat Jnedral Pendidikan Tinggi (2010), kajian ini menegaskan bahwa otonomi perguruan tinggi dalam pelaksanaan SPMI menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan mutu. Namun demikian, berbeda dengan asumsi normatif yang menyatakan bahwa otonomi otomatis menghasilkan mutu, kajian ini menemukan bahwa tanpa komitmen kelembagaan dan budaya mutu yang kuat, SPMI berpotensi menjadi sekedar pemenuhan administratif. Temuan penelitian mengenai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pendidikan Mandalika menunjukkan bahwa SPMI telah dijalankan secara sistemik dan sistematis melalui siklus PPEPP sebagai upaya menjamin mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan. Fokus kebijakan SPMI pada pemenuhan standar SN-DIKTI, baik aspek akademik maupun non-akademik, menegaskan pentingnya standar sebagai instrumen utama pengendalian mutu pendidikan tinggi (Arifudin, 2019; Sulaiman & Wibowo, 2016;

Fadhli, 2020). Namun demikian, implementasi SPMI tersebut masih menempatkan mutu pada dimensi administratif dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga membutuhkan penguatan pada aspek internalisasi nilai dan budaya mutu di tingkat pelaksana pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut memperkuat urgensi integrasi model pengembangan mutu Philip B. Crosby dan Edward Sallis dalam pendidikan Islam. Prinsip *zero defects* dan pencegahan kesalahan sejak tahap perencanaan sebagaimana dikemukakan Crosby relevan untuk memperkuat efektivitas standar SPMI agar tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Sementara itu, pendekatan Edward Sallis yang menekankan evaluasi berkelanjutan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, serta orientasi pada kepuasan pengguna layanan pendidikan memberikan landasan konseptual untuk membangun budaya mutu yang hidup dalam pelaksanaan SPMI. Integrasi kedua model tersebut, ketika dipadukan dengan nilai-nilai keislaman seperti amanah, ihsan, dan tanggung jawab moral, menjadikan SPMI tidak sekadar instrumen pengendalian mutu, tetapi sebagai mekanisme pembinaan kualitas pendidikan Islam yang holistik dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kecerdasan spiritual peserta didik.

Dengan demikian, penelitian ini memposisikan SPMI tidak hanya sebagai kewajiban regulatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tetapi sebagai ruang strategis untuk mengimplementasikan manajemen mutu terpadu berbasis nilai Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada aspek kebijakan dan tata kelola SPMI di perguruan tinggi, penelitian ini menekankan pentingnya transformasi budaya mutu melalui integrasi prinsip manajemen mutu modern dan nilai-nilai pendidikan Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas SPMI dalam menjamin mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan perkembangan zaman. Hasil kajian ini menguatkan pandangan Saifulloh (2012) mengenai pentingnya pendekatan *Continuous Quality Improvemen* (CQI). Dibandingkan dengan penelitian yang menempatkan akreditasi sebagai tujuan akhir penjaminan mutu, kajian ini menegaskan bahwa orientasi berlebihan pada akreditasi justru dapat mengaburkan esensi mutu internal. Dengan demikian, SPMI seharusnya berfungsi sebagai mekanisme reflektif dan korektif yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai instrumen persiapan akreditasi. Sementara itu, Sistem Pnejaminan Mutu Eksternal (SPME) berperan sebagai mekanisme akuntabilitas publik melalui penilaian pihak eksternal seperti BAN-PT. temuan kajian ini sejalan dengan Sulaiman dan Wibowo (2016) serta Yulisma et al. (2023) yang menyatakan bahwa SPME tidak hanya menilai kelayakan institusi, tetapi juga kualitas keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Namun, kajian ini menambahkan bahwa efektivitas SPME sangat bergantung pada kesiapan sistem mutu internal perguruan tinggi. Tanpa SPMI yang kuat, SPME cenderung bersifat seremonial dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu berkelanjutan.

Integrasi Model Pengendalian Mutu dalam Pendidikan Tinggi Islam

Integrasi model pengendalian mutu dalam penddikan tinggi Islam memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik kelembagaan dan nilai-nilai keislaman. Konsep *Quality Control Circle* (QCC) yang dikemukakan Ishikawa memberikan kerangka partisipatif yang relevan untuk diterapkan dalam konteks ini. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek struktural penjaminan mutu, kajian ini menyoroti pentingnya dimensi kultural dan partisipatif dalam membangun budaya mutu di perguruan tinggi Islam. Penelitian ini selanjutnya menghadirkan keterbaruan dengan mengembangkan integrasi model pengembangan mutu Philip B. Crosby dan Edward Sallis dalam konteks pendidikan Islam yang tidak hanya bersifat manajerial, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keislaman. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang memposisikan prinsip *zero defects* dan evaluasi keberlanjutan sebatas pendekatan teknis peningkatan mutu, penelitian ini memaknainya sebagai manifestasi nilai amanah, ihsan, dan itqan dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan Islam.

Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di perguruan tinggi Islam masih menghadapi tantangan dalam hal internalisasi budaya mutu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sulaiman dan Wibowo (2016), namun penelitian ini memperluas analisis dengan menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai keislaman, seperti amanah, ihsan, dan tanggung jawab moral, dapat berfungsi sebagai penguat implementasi pengendalian mutu pendidikan. Lebih lanjut, penelitian ini menghadirkan keterbaruan dengan mengembangkan integrasi model pengembangan mutu Philip B. Crosby dan Edward Sallis dalam konteks pendidikan Islam yang tidak hanya bersifat manajerial, tetapi juga berbasis nilai-nilai keislaman. Prinsip zero defects dari Crosby dan evaluasi berkelanjutan dari Sallis tidak sekadar dipahami sebagai pendekatan teknis peningkatan mutu, melainkan dimaknai sebagai implementasi nilai ihsan dan itqan dalam keseluruhan proses pendidikan Islam. Integrasi ini dirumuskan secara operasional melalui perencanaan berbasis mutu islami, penguatan kapasitas guru sebagai penjamin mutu akademik dan spiritual, serta penerapan sistem evaluasi holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan spiritual peserta didik. Dengan demikian, kontribusi kajian ini terletak pada upaya mensintesis konsep manajemen mutu modern dengan nilai-nilai pendidikan Islam, sehingga mutu pendidikan tidak hanya diukur dari ketercapaian akademik dan kepuasan pemangku kepentingan, tetapi juga dari keberhasilan pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual peserta didik yang relevan dengan tantangan era transformasi digital (Sulaiman & Wibowo, 2016; Hasibuan et al., 2024).

Selain itu, integrasi model Crosby dan Sallis dalam pendidikan Islam memberikan aplikasi strategis terhadap penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di perguruan tinggi Islam. Prinsip pencegahan kesalahan (*prevention rather than inspection*) dari Crosby mendorong lembaga pendidikan untuk membangun standar mutu yang ebrsifat

proaktif dan berorientasi pada perbaikan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran (Crosby , 1979). Dalam konteks SPMI, pendekatan ini memperkuat siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen akreditasi, tetapi juga pada internalisasi budaya mutu yang ebrkelanjutan dan bernilai islami. Sementara itu, pendekatan Edward Sallis yang menekankan evaluasi berkelanjutan dan kepuasan pemangku kepentingan memperluas makna mutu dalam SPME, dengan menempatkan mahasiswa dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Integrasi kedua model tersebut juga memperkuat peran pendidik dan tenaga kependidikan sebagai agen utama pengembangan budaya mutu pendidikan Islam. Pendidik tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi sebagai penjamin mutu yang memikul tanggung jawab profesional sekaligus moral dan spiritual. Penguatan kompetensi pedagogik, profesional, dan spiritual pendidik menjadi prasyarat penting agar proses pembelajaran tidak hanya bebas dari kesalahan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai amanah, ihsan, dan itqan dalam praktik pendidikan (Crosby, 1979; Sallis, 2014). Dengan pendekatan ini, pengembangan mutu pendidikan Islam diarahkan pada pembentukan ekosistem pendidikan yang unggul dan berdaya saing, sekaligus mampu melahirkan generasi ulul albab yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, dan integritas moral, sebagaimana tujuan ideal pendidikan Islam (Hasibuan et al., 2024).

Tantangan dan Strategi Penguatan Mutu Perguruan Tinggi

Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi SPMI dan SPME di perguruan tinggi Indonesia meliputi rendahnya kesadaran sivitas akademika, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Temuan ini sejalan dengan Simanihuruk dan Sukma (2023) serta Wibowo (2016). Namun, kajian ini menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga kultural dan kepemimpinan. Berbeda dengan penelitian yang hanya merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, kajian ini menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu. Temuan ini mendukung Ashari (2022) serta Abdurrahmansyah dan Rismawati (2022) yang menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia industri dan pemangku kepentingan eksternal. Dengan demikian, strategi penguatan mutu harus bersifat holistik, mencakup aspek kebijakan, sumber daya, budaya organisasi, dan kemitraan strategis.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan penjaminan mutu pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sistem dan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan internalisasi budaya mutu. Dengan memperkuat sinergi antara SPMI dan SPME serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kontekstual, perguruan tinggi di Indonesia memiliki peluang besar

untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil kajian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penjaminan mutu yang telah dirumuskan secara normatif dengan praktik implementasi di tingkat program studi dan unit kerja. Banyak perguruan tinggi telah memiliki dokumen mutu yang lengkap, namun belum sepenuhnya dioperasionalkan sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data. Temuan ini memperluas hasil penelitian sebelumnya yang cenderung berhenti pada evaluasi kepatuhan standar, dengan menegaskan bahwa efektivitas penjaminan mutu sangat bergantng pada kemampuan institusi memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi mutu dan pengambilan keputusan berbasis evidensi menjadi strategi penting agar SPMI dan SPME tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berkontribusi pada peningkatan mutu akademik dan tata kelola perguruan tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan instrumen strategis dalam pengendalian mutu pendidikan tinggi di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya internalisasi budaya mutu, keterbatasan sumber daya manusia, serta kecenderungan praktik penjaminan mutu yang bersifat administratif dan berorientasi pada pemenuhan akreditasi. Kajian ini menegaskan bahwa efektivitas pengendalian mutu tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi dan dokumen mutu, tetapi sangat bergantung pada kualitas implementasi dan komitmen seluruh sivitas akademika dalam membangun budaya mutu berkelanjutan. Integrasi teori pengendalian mutu modern, yaitu siklus PDCA dari Ishikawa, prinsip zero defects dari Philip B. Crosby, dan pendekatan manajemen mutu kolaboratif dari Edward Sallis, memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memperkuat sinergi antara SPMI dan SPME. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, integrasi tersebut menjadi lebih bermakna ketika dipadukan dengan nilai-nilai keislaman seperti amanah, ihsan, dan itqan sebagai landasan etis pengendalian mutu, sehingga penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada kepatuhan standar, tetapi juga pada peningkatan kualitas akademik, tata kelola kelembagaan, dan relevansi lulusan secara berkelanjutan di era transformasi global dan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmansyah, A. And Rismawati, I. (2022). Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Melalui Sistem Penjamin Mutu Dengan Pendekatan Total Quality Managemen. Jurnal Perspektif, 6(2), 154. Https://Doi.Org/10.15575/Jp.V6i2.177.

Ashari, M. H. (2022). Pembentukan Jiwa Entrepreneurship Pada Siswa-Siswi Smk Dengan Program Teaching Factory (Tefa). Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas, 7(1), 1-9. Https://Doi.Org/10.52250/P3m.V7i1.538.

Bakti, S., & Lubis, S. (2024). Pengendalian Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi: Konsep Dan Aplikasi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *13*(3), 3261-3270.

Barnawi & M. Arifin, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori & Praktik (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017).

Dian Amirul Muminin, & Romi Faslah. (2025). Konseptualisasi Model Pengendalian Mutu Pendidikan Islam Berbasis Teori Kaoru Ishikawa. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, *10*(2). Https://Doi.Org/10.48094/Raudhah.V10i2.936

Hermelinda, T., Meriana, M., & Afriansyah, B. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal Dan Budaya Mututerhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi:(Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Di Propinsi Bengkulu). *Jaz: Jurnal Akuntansi Unihaz*, *3*(2), 183-195.

Hudaya, A. (2025). Spmi Sebagai Pilar Pengembangan Mutu Berkelanjutan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, *4*(2), 178-189.

Intan, N., & Saguni, F. (2024). Penerapan Manajemen Mutu Pendidikan Islam Dalam Upaya Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi Swasta. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (Kiiies) 5.0*, *3*(1), 112-115.

Kastaji, K., Akhyak, A., Muhajir, A., & Efendi, N. (2024). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Spme). *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, *4*(02), 1388–1401. Https://Doi.Org/10.37680/Almikraj.V4i02.5246.

Kurnia, Z. A., & Faslah, R. (2025). Integrasi Model Pengendalian Mutu Dalam Perspektif Philp B. Crosby Dan Edwar Sallis Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, *10*(2).

Maulidiyah, A. (2025). Integrasi Evaluasi Dan Pengendalian Mutu Dalam Upaya Penguatan Kompetitif Lembaga Pendidikan Islam Nasional. *Journal Of Educational And Religious Perspectives*, *1*(1), 15-22.

Najwa, L., Iqbal, M., & Aryani, M. (2023). Manajemen Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Perguruan Tinggi. Jurnal Visionary : Penelitian

Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan, 11(1), 72. Https://Doi.Org/10.333394/Vis.V11i1.7391.

Neliwati, Surya Bakti, & Sopian Lubis. (2024). Pengendalian Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi: Konsep Dan Aplikasi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *13*(3), 3261-3270. Https://Doi.Org/10.58230/27454312.944.

Ramdhan, D. F., & Siregar, H. S. (2019). Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Ptkis). *Jurnal Perspektif*, *3*(1), 75–109. Https://Doi.Org/10.15575/Jp.V3i1.40.

Ristianah, N., & Ma'sum, T. (2022). Konsep Manajemen Mutu Pendidikan. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 47.

Wibowo, N. M. (2016). Upaya Memperkecil Kesenjangan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Tuntutan Dunia Industri. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, 23(1), 45. Https://Doi.Org/10.21831/Jptk.V23i1.9354.

Zikri Adib Kurnia, & Romi Faslah. (2025). Integrasi Model Pengendalian Mutu Dalam Perspektif Philp B. Crosby Dan Edwar Sallis Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, *10*(2). Https://Doi.Org/10.48094/Raudhah.V10i2.931.

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

